

Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan

Yassir ^{1✉} Mursalim ² Asriani Junaid ³

Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan dan transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang. Untuk mencapai tujuan penelitian maka yang menjadi populasi adalah pegawai yang bekerja pada beberapa SKPD yang ada pada Kabupaten Enrekang yang ditentukan sebanyak 43 responden. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampling sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menyebar kuesioner kepada seluruh responden, dengan teknik analisis data menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda serta pengujian hipotesis. Hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan dan transparansi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Kata Kunci: *akuntabilitas; pengawasan keuangan; transparansi; pengelolaan keuangan.*

Abstract

This study aimed to analyze the effect of financial accountability, financial supervision, and budget transparency on financial management in the Enrekang Regency Government. To achieve the research objectives, the population is employees who work in several SKPDs in Enrekang Regency, which as many as 43 respondents determine. The sampling technique used is census sampling, where all population members are sampled. This study used primary data collected by distributing questionnaires to all respondents. Data analysis techniques used using validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The research results found that financial accountability, financial supervision, and budget transparency had a positive and significant effect on financial management in the Enrekang Regency Government.

Keywords: *accountability; financial supervision; transparency; financial management.*

Copyright (c) 2022 Yassir, Mursalim & Asriani Junaid

✉ Corresponding author :

Email Address : yassirsulaiman73@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya (Rahim et al., 2020). Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat dilihat dari tingkat pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal (Rahim et al., 2018). Kinerja suatu organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan (Mahsun, 2016; Fathiyah et al., 2021). Untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program, berhasil atau tidaknya diperlukan pengukuran kinerja sebagai alat ukur. Kinerja pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Santoso, 2013).

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah memerlukan sistem pengelolaan keuangan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan mengendalikan pemerintahan agar potensi terjadinya kecurangan-kecurangan dan penyimpangan semakin kecil serta adanya kejelasan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan (Sumarsono, 2010; Sholikah, 2018). Pengelolaan keuangan menurut Halim (2016) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Hanafiah et al., 2016).

Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah maka banyak hal yang harus diperhatikan, dimana dalam penelitian ini difokuskan pada masalah akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan dan transparansi anggaran. Akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, sebagaimana dikemukakan oleh (Halim, 2012; Auditya et al., 2013) bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja. Konsep ini menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan pemerintahan (kinerjanya) harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan

para pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Hal ini penting karena akuntabilitas menjadi ukuran apakah aktivitas pemerintah atau pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya (Kumorotomo, 2005). Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011), memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Baswir, 2015; Purnama & Nadirsyah, 2016) bahwa pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku. Pengawasan keuangan daerah berkaitan erat dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena pencapaian keberhasilan suatu visi dan misi membutuhkan pengawasan yang baik dan maksimal, baik dari segi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Semakin baik tingkat pengawasan maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif pula (Halim, 2012; Cicilia et al., 2019). Penelitian (Suparno, 2012; Hanafiah et al., 2016) mengatakan bahwa variabel pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain akuntabilitas dan pengawasan, maka transparansi anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah seperti yang diungkapkan oleh (Mahsun, 2015; Garung & Ga, 2020) bahwa transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi dapat menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kebijakan publik, dan proses pembentukan. Informasi yakni suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Masalah informasi, masyarakat berperan sebagai alat pengawasan untuk kebijakan publik yang muncul dapat memberikan hasil optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat. Penelitian (Ginting, 2013) menemukan bahwa transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, merupakan organisasi sektor publik pemerintah dengan visi yaitu terwujudnya Kabupaten Enrekang sebagai Daerah Agropolitan yang lebih maju, unggul, sejahtera dan religious. Untuk mewujudkan visi tersebut maka dituntut untuk melaksanakan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik ini seiring dengan diterapkannya konsep otonomi daerah dalam

pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Enrekang masih ditemukan permasalahan dalam anggaran yang digunakan oleh masing-masing kepala daerah dan SKPD terkait. Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan keuangan saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Namun permasalahan yang dihadapi saat ini adalah bahwa pegawai yang ditugaskan sebagai tenaga pengelola keuangan masih memiliki kinerja yang kurang optimal dalam mengelola anggaran (Salwah, 2019). Dimana penyerapan anggaran dalam membiayai program khususnya di Kabupaten Enrekang masih cukup rendah. Salah satu faktor yang menyebabkan kinerja anggaran yang masih cukup rendah adalah disebabkan karena kurangnya kompetensi tenaga pengelola keuangan dalam mengelola anggaran untuk membelanjai sejumlah program di Kabupaten Enrekang. Adanya permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah maka peneliti tertarik untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan dan transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Theory stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya (Donaldson & Davis, 1991; Nasution, 2022).

Kuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan menurut (Hamid, 2020) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung-jawab. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya

untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (O'Neill, 2013; Hanafiah et al., 2016).

Dalam era pembangunan dewasa ini, pemerintah orde baru dari Repelita I hingga saat ini, masalah pembangunan disegala bidang terus meningkat. Oleh sebab itu peranan pengawasan harus ditingkatkan pula, agar penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan/jabatan yang langsung atau tidak langsung yang dapat merugikan keuangan negara/daerah dapat ditekan seminimal mungkin (Purnama & Nadirsyah, 2016). Demikian pentingnya arti pengawasan dan pemeriksaan sehingga para ahli manajemen selalu mencantumkan fungsi pengawasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen. Adapun unsur yang terkandung dalam manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengontrolan. Tetapi ada juga pembagian yang lain, yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Menurut (Mardiasmo, 2018; Irfandi, 2020), berdasarkan ruang lingkupnya pengawasan dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Pengawasan internal yang terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, dan (2) Pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh baik atasan langsung dan aparat pengawas fungsional yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah, atau juga yang dikenal sebagai APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah). APIP terdiri dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).

Transparansi merupakan keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum. Menurut UU No.28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan Nepotisme, azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintah daerah azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Mahsun (2006) menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah seringkali diartikan sebagai mobilisasi sumber keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Pandangan seperti ini terlalu menyederhanakan dan cenderung menghasilkan rekomendasi kebijakan yang reaktif dan sepihak. Bagi penganut pandangan ini otonomi daerah akan sulit terwujud karena dari segi kualitas, sumber-sumber pembiayaan yang tersedia bagi daerah otonom sangat "kurus", sedangkan dari sudut kuantitas sumber-sumber

pembiayaan tersebut sangat sedikit. Halim (2016) mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penata-usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah maka diperlukan adanya prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu konsep terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dari satu pihak ke pihak yang lain. Akuntabilitas merupakan kemauan memberikan penjelasan dan justifikasi keinginan dan perbuatan kepada yang berkepentingan (Hunt, 2006; Badok & Sudirman, 2018). Hal ini penting karena akuntabilitas menjadi ukuran apakah aktivitas pemerintah atau pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya (Kumorotomo, 2005).

Istilah akuntabilitas sering diartikan memiliki makna yang sama dengan *stewardship* yaitu sebagai pertanggungjawaban. Akan tetapi *stewardship* lebih mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisiensi tanpa dibebani kewajiban melaporkan. Teori *stewardship* berkaitan dengan akuntabilitas yakni teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991; Nasution, 2022). Teori tersebut mengasumsikan dimana terdapat hubungan antara organisasi pemerintah dengan tujuan yang akan dicapai yaitu mensejahterakan masyarakat. Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggung-jawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* (manajemen dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Magdalena, 2014; Siregar, 2011; Siswandi, 2013) yang menemukan bukti empiris bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sehingga hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

H1= Akuntabilitas Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengawasan adalah pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan. Pengawasan memiliki peran penting dan positif dalam proses manajemen, menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai waktunya. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dalam APBD dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan serta target-target operasi organisasi. Implikasi teori dalam penelitian ini bahwa sebagai wakil pemilik (pemerintah daerah) untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku manajemen (stewardship) diharapkan mampu menjalankan peran tersebut. Namun efektifitas kepala daerah sebagai fungsi pengawasan akan terhalang jika dalam waktu yang sama anggota DPRD juga ikut andil dalam manajemen baik secara formal maupun informal. Jika ini terjadi maka bisa terjadi kolusi antara manajemen dan terjadi transfer kekayaan pemilik (Fama & Jensen, 1983; Widodo, 2016). Hal ini diasumsikan bahwa pemerintah wajib memberikan laporan pertanggungjawaban dalam APBD kepada rakyat dalam bentuk LKPD yang telah diaudit oleh BPK. LKPD dibuat oleh pemerintah daerah akan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya yang nantinya akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penelitian sebelumnya yakni (Suparno, 2012; Putra et al., 2017) menemukan bahwa variabel pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sehingga hipotesis yang diangkat adalah sebagai berikut:

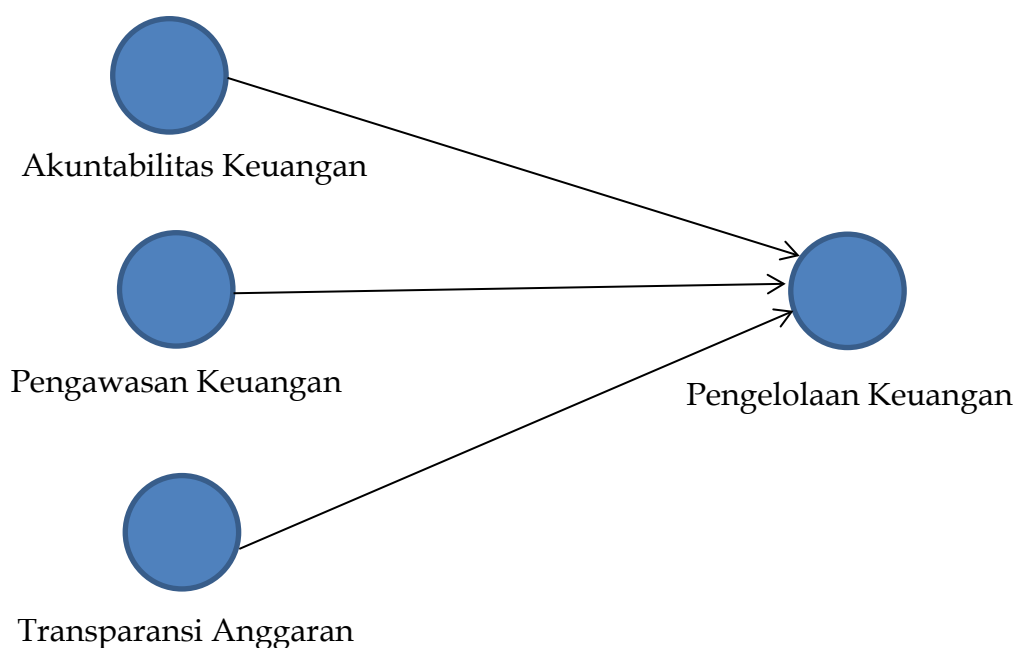
H2= Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat. Menurut perspektif teori stewardship anggaran disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi kriteria yaitu: Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses, Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik (Siswandi, 2013; Siregar, 2011). Stewardship theory memandang bahwa manajemen organisasi sebagai “stewards atau penatalayanan”, akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Implikasi penelitian ini bahwa praktek pelaporan barang milik daerah yang baik (berkualitas), Pemerintah Daerah bertindak sebagai stewards, penerima amanah menyajikan informasi secara transparan sehingga dapat bermanfaat bagi organisasi

dan para pengguna informasi barang milik daerah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ginting, 2013) menemukan bahwa transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sehingga hipotesis yang diangkat adalah sebagai berikut:

H3= Transparansi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah

Model penelitian ini seperti terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD pada Pemerintah Kabupaten Enrekang yang berjumlah 43 SKPD. Adapun teknik penarikan sampel menggunakan teknik sampling sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2017). Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh responden yang diisi dengan beberapa pernyataan dengan lima opsi jawaban yang akan diberi bobot skor seperti jawaban (Sangat Setuju=5, Setuju=4, Cukup Setuju=3, Tidak Setuju=2, Sangat Tidak Setuju=1). Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui empat tahapan pengujian. Tahap pertama adalah melakukan uji statistik deskriptif. Tahap kedua adalah uji instrumen penelitian yang terdiri dari (uji validitas, uji reliabilitas). Tahap ketiga adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas). Tahap keempat adalah menguji seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dan akan dibuktikan melalui uji koefisien determinasi, uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji f).

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Kode	Indikator	Referensi
Akuntabilitas Keuangan (X1)	X1.1	Adanya SOP	(Hanafiah et al., 2016; Sangki, 2017)
	X1.2	Penyelenggaraan urusan pemerintahan	
	X1.3	Laporan tahunan	
	X1.4	Sistem pemantauan kinerja	
	X1.5	Sistem pengawasan	
Pengawasan Keuangan (X2)	X2.1	Akurat	(Siswanto 2009; Purnama & Nadirsyah, 2016)
	X2.2	Tepat waktu	
	X2.3	Obyektif dan komprehensif	
	X2.4	Fleksibel	
	X2.5	Diterima para anggota organisasi	
Transparansi Anggaran (X3)	X3.1	Informativeness (informatif)	(Purnama & Nadirsyah, 2016;)
	X3.2	Openess (keterbukaan)	
	X3.3	Disclosure (pengungkapan)	
Pengelolaan Keuangan (Y)	Y1.1	Tertib	(Hanafiah et al., 2016; Siregar, 2015)
	Y1.2	Taat	
	Y1.3	Efektif	
	Y1.4	Efisiensi	
	Y1.5	Ekonomis	
	Y1.6	Manfaat	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan analisis data dalam penelitian ini, maka tahap pertama akan dilakukan uji instrument penelitian. Instrumen dikatakan baik apabila instrumen penelitian tersebut memenuhi persyaratan utama yaitu valid (sahih) dan reliabel (andal). Hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	r_{hitung}	r_{kritis}	Cronbach's Alpha	Keterangan
Akuntabilitas Keuangan (X1)	0,614	0,30	0,767	Valid dan reliabel
	0,552	0,30		Valid dan reliabel
	0,512	0,30		Valid dan reliabel
	0,591	0,30		Valid dan reliabel
	0,446	0,30		Valid dan reliabel
Pengawasan Keuangan (X2)	0,717	0,30	0,793	Valid dan reliabel
	0,599	0,30		Valid dan reliabel
	0,532	0,30		Valid dan reliabel
	0,686	0,30		Valid dan reliabel
	0,359	0,30		Valid dan reliabel
Transparansi Anggaran (X3)	0,376	0,30	0,618	Valid dan reliabel
	0,469	0,30		Valid dan reliabel
	0,439	0,30		Valid dan reliabel
	0,501	0,30		Valid dan reliabel
	0,361	0,30		Valid dan reliabel
Pengelolaan Keuangan (Y)	0,547	0,30	0,741	Valid dan reliabel
	0,575	0,30		Valid dan reliabel
	0,518	0,30		Valid dan reliabel
	0,374	0,30		Valid dan reliabel

Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa sembilanbelas item pernyataan dari semua variabel terlihat dengan kisaran korelasi 0,374 hingga 0,686, hal ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan memiliki kisaran korelasi yang lebih besar dari 0,30. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap butir pernyataan sudah dinyatakan valid. Sedangkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua instrument penelitian adalah reliabel. Hal ini dapat diketahui bahwa semua variabel penelitian ini mempunyai nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,60.

Tahap ketiga adalah uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov Smirnov test. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan dari uji kolmogorov smirnov $> 0,05$ ($\alpha = 5\%$) maka residual model regresi berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya uji normalitas dapat disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Uji Normalitas dengan One Sample Kolmogorov Smirnov Test

Uji Kolmogorov-Smirnov Test	Unstandardized Coefficient
Nilai Kolmogorov smirnov test	0,091
Sign	0,200

Berdasarkan hasil uji normalitas yang sebagaimana telah ditunjukkan pada tabel 3, diperoleh nilai probabilitas 0,200 yang lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa data yang akan diregresikan sudah berdistribusi normal, dengan demikian asumsi normalitas residual telah terpenuhi.

Uji multikolineritas dilakukan untuk mengetahui besarnya interkorelasi antar variabel bebas dalam penelitian ini. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah multikolineritas. Untuk menguji multikolineritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Faktor). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolineritas. Hasil pengujian multikolineritas dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolineritas

Model	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Akuntabilitas Keuangan	0,645	1,549	Tidak ada gejala multikolineritas
Pengawasan Keuangan	0,744	1,343	Tidak ada gejala multikolineritas
Transparansi Anggaran	0,606	1,649	Tidak ada gejala multikolineritas

Tabel 4 yakni uji multikolineritas yang dilihat dari nilai tolerance juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai variance inflation factor (VIF) juga

menunjukkan nilai VIF lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji hetroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yakni dengan menggunakan metode glejser dengan membandingkan antara nilai probabilitas dengan nilai standar, apabila nilai probabilitas lebih besar dari nilai standar berarti terbebas dari heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas terlihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Metode Glejser

Variabel Independen	Sig	Keterangan
Akuntabilitas Keuangan	0,818	Tidak terjadi heterokedastisitas
Pengawasan Keuangan	0,492	Tidak terjadi heterokedastisitas
Transparansi Anggaran	0,125	Tidak terjadi heterokedastisitas

Berdasarkan tabel 5, yakni hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser, terlihat bahwa setiap variabel bebas (akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan dan transparansi) dalam penelitian ini tidak ada satupun yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen (nilai absolut residual). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dengan demikian bahwa model regresi telah lolos dari uji heteroskedastisitas.

Tahap keempat yaitu analisis regresi linear berganda untuk mengetahui keterkaitan pengaruh akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan dan transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang, dengan menggunakan sistem komputerisasi program SPSS release 23.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	.510	.505	
Akuntabilitas Keuangan	.409	.131	.393
Pengawasan Keuangan	.220	.093	.277
Transparansi anggaran	.285	.131	.282

Berdasarkan tabel analisis regresi linear berganda, maka diperoleh suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,510 + 0,393 + 0,277 + 0,282$$

Dari hasil persamaan regresi linear berganda tersebut maka diberikan penjelasan bahwa nilai koefisien regresi (X1) akuntabilitas keuangan sebesar 0,393 yang berarti bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan, dimana apabila akuntabilitas keuangan bertambah sebesar satu satuan maka akan bertambah 39,3% pengelolaan keuangan, sementara nilai koefisien regresi

(X2) sebesar 0,277 yang berarti bahwa pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan, ini menunjukkan bahwa apabila pengawasan keuangan bertambah sebesar satu satuan maka akan bertambah sebesar 27,7% pengelolaan keuangan dan koefisien regresi (X3) sebesar 0,282 yang berarti bahwa transparansi anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan, ini menunjukkan bahwa apabila transparansi anggaran bertambah sebesar satu satuan maka pengelolaan keuangan juga akan meningkat sebesar 28,2%.

Uji serempak yaitu suatu analisis untuk menguji apakah akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan dan transparansi anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang. Pengujian serempak dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai signifikan dengan nilai standar. Apabila nilai sig. lebih kecil atau kurang dari 0,05 berarti memberikan pengaruh secara serempak. Hasil pengujian (uji f) dapat dilihat melalui tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji F
Anova

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4.021	3	1.340	19.671	.000 ^b
Residual	2.657	39	.068		
Total	6.678	42			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS release 23, maka peneliti dapat merangkum hasil perhitungan uji F yaitu hubungan antara akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan dan transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang, dimana memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan dan transparansi anggaran berpengaruh serempak terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Uji parsial (uji t) bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel, yakni dengan cara membandingkan antara nilai signifikan dengan nilai standar. Apabila nilai signifikan kurang atau lebih kecil dari nilai standar (0,05) berarti memberikan pengaruh secara signifikan. Hasil pengujian parsial dapat dilihat melalui tabel 8.

Tabel 8. Hasil Pengujian secara Parsial

Variabel Penelitian	Nilai Sign.	Nilai Standar	Keputusan
Akuntabilitas Keuangan	0,003	0,05	Signifikan
Pengawasan Keuangan	0,023	0,05	Signifikan
Transparansi Anggaran	0,036	0,05	Signifikan

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial maka dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel akuntabilitas keuangan (X1) sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 ($0,003 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan

berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan, sementara nilai signifikan variabel pengawasan keuangan (X2) sebesar 0,023 lebih kecil dari 0,05 ($0,023 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dan nilai signifikan variabel transparansi anggaran (X3) sebesar 0,036 lebih kecil dari 0,05 ($0,036 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Untuk mengetahui hubungan antara akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan dan transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang maka dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi dan determinasi yang disajikan pada tabel 9.

Tabel 9. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.776 ^a	.602	.571	.26103

Berdasarkan tabel model summary maka diperoleh nilai $R = 0,776$ yang dapat diartikan bahwa kekuatan antara akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan dan transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan berada pada kategori kuat, sebab berada pada kisaran $0,70 < KK < 0,90$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan dan transparansi memiliki hubungan yang kuat terhadap pengelolaan keuangan karena nilai R mendekati 1.

Kemudian untuk mengetahui koefisien determinasi (lihat adjusted Rsquare) maka diperoleh nilai $R^2 = 0,571$, hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan dan transparansi anggaran dapat menjelaskan pengelolaan keuangan yaitu sebesar 57,1%, sedangkan sisanya sebesar 42,9% ($100 - 57,10 \times 100$) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada kantor pemerintah daerah di Kabupaten Enrekang. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, pegawai yang bekerja di setiap SKPD telah memberikan tanggapan bahwa akuntabilitas keuangan yang dilaksanakan selama ini sudah tergolong sudah sangat transparan. Alasannya karena setiap aktivitas pekerjaan yang berhubungan dengan pelaporan keuangan sudah menggunakan standar operasional prosedur (SOP), dimana dengan SOP yang telah dibuat selama ini digunakan sebagai panduan dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada publik. Dimana dengan SOP yang diterapkan selama ini berisi tahapan dan urutan suatu pekerjaan yang menuntun para pegawai yang bekerja dalam penyelesaian pekerjaannya. Dalam pelaksanaan transparansi keuangan dari setiap unit SKPD pada kantor pemerintah daerah, Kabupaten Enrekang dikatakan telah berjalan dengan baik karena

penyelenggaraan urusan pemerintahan sudah terlaksana sesuai dengan visi dan misi, alasannya karena dalam penanganan pekerjaan maka masing masing unit SKPD telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing masing. Kemudian dalam menunjang pengelolaan keuangan secara transparansi, maka setiap SKPD selalu ada pengawasan keuangan yakni berkaitan dengan proses dan laporan pertanggung jawaban dari setiap unit SKPD dalam lingkup kantor pemerintah di Kabupaten enrekang. Sehingga dengan adanya pelaksanaan pengawasan keuangan yang dilakukan adalah dimaksudkan untuk menjaga agar kegiatan yang telah disusun benar benar telah dijalankan dan selain itu untuk menunjang pelaksanaan pengumpulan yang dikeluarkan oleh masing masing unit SKPD dalam lingkup pada kantor pemerintah daerah di Kabupaten Enrekang. Dan dengan adanya pengawasan keuangan maka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah disusun benar benar dapat dipertanggung jawabkan.

Pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan keuangan pada masing masing SKPD dalam lingkup pemerintah daerah, Kabupaten Enrekang yang menunjukkan bahwa pimpinan atau atasan yang secara langsung dan rutin dalam melakukan pemantauan guna menunjang efektifitas dalam pengelolaan keuangan dalam lingkup SKPD Kantor pemerintah daerah di Kabupaten Enrekang. Dan selain itu dalam prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan yang menunjukkan bahwa sistem pengawasan anggaran yang dilaksanakan selama ini sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil analisis mengenai persepsi pegawai yang bekerja pada SKPD dalam lingkup kantor penerintah daerah di Kabupaten Enrekang terlihat bahwa dalam pelaksanaan sistem penganggaran yang dilaksanakan selama ini sudah menerapkan prinsip transparansi sehingga dapat memberikan dampak dalam meningkatkan pengelolaan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan pada masing-masing unit SKPD di kantor pemerintah daerah kabupaten Enrekang dapat berjalan secara efisien dan efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hanafiah et al., 2016; Siregar, 2011; Sudewi, 2017) memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan.

Pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada kantor pemerintah daerah di Kabupaten Enrekang. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik pengawasan keuangan yang dilakukan oleh masing masing unit kerja SKPD maka akan memberikan dampak dalam meningkatkan kinerja keuangan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor yang meningkatkan efektifitas pengelola keuangan jika ditunjang oleh adanya tingkat pengawasan keuangan. Masalah pengawasan yang diterapkan dalam unit SKPD khususnya pada lingkup pemerintah daerah di Kabupaten Enrekang, merupakan hal yang fundamental alasannya karena pengawasan keuangan daerah berkaitan dengan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Terkait dengan pengawasan keuangan oleh masing masing unit SKPD dalam lingkup kantor pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dimana dari hasil penyebaran kuesioner kepada sejumlah pegawai pada masing masing unit SKPD pada kantor pemerintah daerah, kabupaten enrekang. Dimana yang terkait dengan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan selama ini sudah

tepat, alasannya karena informasi keuangan yang disajikan sudah akurat. Kemudian dalam mengalokasikan dana anggaran yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan visi, misi dan program kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian dalam hal pengendalian keuangan yang telah dilakukan oleh masing SKPD pada lingkup pemerintah daerah, Kabupaten Enrekang yang sudah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini dapat dilihat dari sistem pengendalian keuangan yang dilakukan selama ini, dimana setiap program yang telah ditetapkan sudah dianggarkan sehingga memungkinkan masing masing unit SKPD dapat melakukan pengawasan keuangan. Selain itu dari persepsi pegawai yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sistem pengendalian keuangan sudah terlaksana secara efektif hal ini disebabkan karena adanya pengawasan keuangan internal dan eksternal pada kantor pemerintah daerah di kabupaten Enrekang.

Teori stewardship mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan principal. Steward melindungi dan memaksimalkan shareholder melalui kinerja organisasi, oleh karena itu fungsi utilitas steward dimaksimalkan, sehingga dari teori yang sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana dengan adanya pengawasan keuangan yang dilaksanakan selama ini diharapkan akan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Suparno, 2012; Putra et al., 2017) menemukan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian lainnya yaitu (Badruzzaman & Ruslina Lisda, 2018) yang menemukan bahwa semakin tinggi pengaruh pengawasan keuangan, maka akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Transparansi Anggaran terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa transparansi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada kantor pemerintah daerah di Kabupaten Enrekang, dimana semakin baik transparansi keuangan maka akan secara nyata dapat meningkatkan pengelolaan keuangan. Faktor transparansi pengelolaan keuangan pada kantor pemerintah daerah sudah terlaksana dengan baik, alasannya karena penyajian keuangan oleh masing masing unit SKPD, mampu menyajikan informasi keuangan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Kemudian dalam penyusunan anggaran yang dilakukan oleh bagian anggaran pada kantor pemerintah daerah, kabupten Enrekang yang telah dilaksanakan secara transparansi. Kemudian dalam hal transparansi dimana dari persepsi pegawai menyatakan bahwa masyarakat selalu mengharapkan pengungkapan kepada publik mengenai aktivitas dan kinerja yang dicapai oleh unit kerja SKPD pada Kantor pemerintah daerah, Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra et al., 2017) menemukan bahwa ada pengaruh transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mendukung penelitian (Badruzzaman & Ruslina Lisda, 2018) yang menemukan bahwa semakin tinggi pengaruh transparansi pengelolaan keuangan maka akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah, sedangkan penelitian oleh (Umar et al., 2018) menemukan bahwa transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi inspektorat Aceh.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan dan transparansi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada kantor pemerintah daerah di Kabupaten Enrekang. Adapun saran yang dapat diberikan peneliti sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu pertama, hendaknya untuk menunjang akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pada lingkup pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pengawasan yang terkait dengan laporan pertanggung jawaban dari setiap anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, disarankan kepada kantor pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas dalam pengawasan dari setiap dana anggaran guna dapat menyajikan informasi keuangan yang tepat. Dan ketiga, disarankan agar dalam penyajian keuangan hendaknya lebih transparan guna masyarakat dapat mengetahui aktivitas dan kinerja yang dicapai selama ini.

Referensi:

- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21-42.
<https://doi.org/10.33369/fairness.v3i1.15274>
- Badok, B., & Sudirman, R. (2018). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas Kebijakan Publik Dan Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah. *Cesj: Center Of Economic Students Journal*, 1(1), 83-92.
<https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/index/login?source=%2findex.php%2fcjsj%2farticle%2fdownload%2f82%2f41>
- Badruzzaman, S., & Ruslina Lisda, S. E. (2018). Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey Pada Dinas Di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unpas Bandung*.
<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/37365>
- Cicilia, V. S. E., Murni, S., & Engka, D. (2019). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 17(2).
<https://doi.org/10.35794/jpekd.10245.17.2.2015>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory Or Agency Theory: Ceo Governance And Shareholder Returns. *Australian Journal Of Management*, 16(1), 49-64.
<https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Fathiyah, F., Sukmana, A., Majid, H., & Masnun, M. (2021). Analisis Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. *J-Mas (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 117-122.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jmas.v6i1.236>
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa

- Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19-27.
<https://doi.org/10.35508/Jak.V8i1.2363>
- Ginting, J. (2013). Pengaruh Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, Serta Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Pengaruh Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, Serta Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
<https://jurnal.harianregional.com/index.php/Akuntansi/article/view/27160>
- Halim, A. (2016). Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Daerah).
- Hamid, H. (2020). Manajemen Pemerintahan Daerah. Penerbit Garis Khatulistiwa (Anggota Ikapi).
- Hanafiah, R. R., Abdullah, S. A. S., & Saputra, M. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Di Skpk Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(4). <http://e-repository.unsyiah.ac.id/jaa/article/view/5733>
- Irfandi, D. (2020). Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 5(1). <http://www.jim.unsyiah.ac.id/fisip/article/view/14076>
- Kumrotomo, W. (2005). Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi. Map Ugm & Pustaka Pelajar.
- Magdalena, T. (2014). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Apbd (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang). Skripsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Pemerintahan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. <https://www.neliti.com/publications/131955/pengaruh-akuntabilitas-keuangan-pengawasan-keuangan-daerah-dan-transparansi-angg>
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Bpfe-Yogyakarta.
- Nasution, D. A. D. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. *Prosiding Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dharmawangsa*, 1(1), 72-77.
<https://proceeding.dharmawangsa.ac.id/index.php/PFEB/article/view/39>
- O'Neill, O. (2013). Intelligent Accountability In Education. *Oxford Review Of Education*, 39(1), 4-16. <https://doi.org/10.1080/03054985.2013.764761>
- Purnama, F., & Nadirsyah, N. (2016). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 1-15. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/Eka>
- Putra, G., Rasuli, M., & Haryani, E. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Riau University.
<https://www.neliti.com/publications/131955/pengaruh-akuntabilitas-keuangan-pengawasan-keuangan-daerah-dan-transparansi-angg>

- Rahim, S., Ahmad, H., Muslim, M., & Nursadirah, A. (2020, October). Disclosure of Local Government Financial Statements in South Sulawesi. In Brawijaya International Conference on Multidisciplinary Sciences and Technology (BICMST 2020) (pp. 1-6). Atlantis Press.
- Rahim, S., Muslim, M., & Leo, M. (2018). Government Auditor Performance: The Main Role Of Locus Of Control. In International Conference And Call For Paper (Vol. 1, No. 1).
- Salwah, A. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 164-182. [Http://Jta.Lan.Go.Id/Index.Php/Jta/Article/View/110](http://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/110)
- Santoso, S. (2013). Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4). [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.35794/Emba.1.4.2012.2647](https://doi.org/https://doi.org/10.35794/Emba.1.4.2012.2647)
- Sholikhah, M. (2018). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. [Http://Repository.Untag-Sby.Ac.Id/Id/Eprint/495](http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/495)
- Siregar, L. (2011). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Apbd Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderator Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar. [Http://Repository.Usu.Ac.Id/Handle/123456789/33427](http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/33427)
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D. Penerbit Cv. Alfabeta: Bandung, 225.
- Umar, Z., Syawalina, C. F., & Khairunnisa, K. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh. *Kolegial*, 6(2), 136-148. [Http://Journals.Stiedwisakti.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Kolegial/Article/View/64](http://journals.stiedwisakti.ac.id/ojs/index.php/kolegial/article/view/64)
- Widodo, A. (2016). Efek Moderasi Dari Komisaris Independen Pada Hubungan Antara Kepemilikan Manajerial Dengan Kebijakan Dividen Dan Kebijakan Utang. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (Jimat)*, 7(1), 1-20. [Http://Jurnal.Stietotalwin.Ac.Id/Index.Php/Jimat/Article/Download/108/105](http://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/jimat/article/download/108/105)